

## CALVIN DAN LIMA PILAR INSTITUSI SOSIAL

KALVIN S. BUDIMAN

Lima pilar institusi sosial yang dimaksud adalah *keluarga, gereja, pemerintah, ekonomi, dan pendidikan*. Kelima pilar ini bukan kategori yang baku. Kelima pilar institusi sosial tersebut adalah metode pendekatan yang penulis pakai untuk membaca pemikiran John Calvin. Melalui metode tersebut, penulis bermaksud untuk menarik prinsip-prinsip etika sosial dari tulisan-tulisan Calvin. Dengan kata lain, ia sendiri tidak pernah membakukan kelima hal ini sebagai “pilar-pilar kehidupan sosial.” Namun hal itu tidak berarti bahwa ia sama sekali tidak berbicara tentang sektor-sektor kehidupan sosial. Sebaliknya, penulis mendapati aplikasi sosial yang sangat luas dari teologi *theocentric* (berpusat pada kedaulatan Allah) yang ia pegang dengan setia.

Untuk menggarisbawahi keunikan teologi sosial yang Calvin pegang, penulis akan membandingkan pemikiran Calvin dengan kecenderungan-kecenderungan sekular dari budaya pada zaman sekarang. Tentu saja dalam wadah yang terbatas ini, penulis tidak memiliki ruang yang cukup untuk memaparkan secara rinci seluruh aspek teologis dan moral yang terkandung dalam masing-masing institusi sosial yang akan dibicarakan. Penulis akan selektif dan memfokuskan pembahasan pada aspek “otoritas” yang lahir dari teologi *theocentric* dalam pemikirannya.

### 1. KELUARGA

Calvin percaya bahwa keluarga merupakan institusi sosial yang paling hakiki, yang keberadaannya ditegakkan oleh Tuhan sendiri. Ia melihat ada relasi timbal balik yang tidak terpisahkan antara masyarakat yang harmonis dengan keluarga yang harmonis. Ia berkata, “Integritas masyarakat tidak akan dapat dipertahankan jikalau anak-anak tidak mentaati orangtua, dan jikalau mereka yang telah ditetapkan oleh Tuhan

sendiri untuk menjadi teladan tidak dihormati.”<sup>1</sup> Dengan kata lain, baginya tanggung jawab moral dalam keluarga memiliki dampak penting dan langsung dalam kelangsungan struktur sosial di masyarakat.

Menurut Calvin, tanggung jawab moral tersebut akan terpenuhi jikalau anggota keluarga memahami hak dan kewajiban mereka. Dalam tafsirannya terhadap hukum kelima dari hukum Taurat (Kel. 20:12; Bil. 5:16) dan Efesus 5:21-27, ia memperkenalkan sebuah prinsip yang penulis simpulkan dengan istilah: “sistem otoritas kasih yang dilandaskan pada Kristus sebagai pusat keluarga.” Ia melihat bahwa salah satu prinsip penting yang ditanamkan melalui institusi keluarga adalah prinsip “otoritas.” Dalam tafsiran terhadap hukum kelima, ia memahami istilah “hormatilah” (*kabēd*) sebagai sikap hormat yang kita berikan baik kepada Tuhan maupun kepada manusia yang memegang otoritas tertentu. Ketika dikenakan kepada orangtua, istilah *kabēd* mengandung tiga macam kewajiban moral anak-anak kepada orangtua: penghargaan, ketaatan, dan pengabdian; atau menurut kata-katanya sendiri,

mereka harus menghargai orangtua; mereka harus dengan taat menjalankan perintah orangtua dan mau dipimpin oleh orangtua; dan mereka harus memiliki rasa hutang budi pada orangtua serta dengan penuh cinta kasih melayani orangtua.<sup>2</sup>

Lebih lanjut, Calvin bahkan menegaskan bahwa hak sebagai orangtua adalah hak yang “suci” (*sacred*), yang mana hal ini berarti jika seseorang tidak menghormati orangtuanya, maka hal itu sama saja dengan tidak menghormati Tuhan sendiri. Orang itu bersalah secara moral bukan hanya kepada orangtuanya, tapi kepada Tuhan sendiri. Baginya, orangtua adalah perwakilan dari Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita yang patut kita syukuri sebab keberadaan orangtua adalah salah satu wujud kebaikan Tuhan (*God's favour*) dalam kehidupan kita.<sup>3</sup>

<sup>1</sup>“*Nay, human society cannot be maintained in its integrity, unless children modestly submit themselves to their parents, and unless those, who are set over others by God's ordinance, are even reverently honored*” (*Commentaries on the Four Last Books of Moses arranged in the Form of a Harmony* [trans. Charles W. Bingham; Grand Rapids: Baker, 1996] 3.7).

<sup>2</sup>“*that they should regard them with reverence; that they should obediently comply with their commands, and allow themselves to be governed by them; and that they should endeavor to repay what they owe to them, and thus heartily devote to them themselves and their services*” (ibid. 7).

<sup>3</sup>Ibid. 10.

Calvin menganggap prinsip otoritas yang diajarkan melalui keluarga sebagai hal yang penting karena ia percaya bahwa kesombongan, keangkuhan, ketidakmauan untuk tunduk pada otoritas, dan anarki merupakan kecenderungan-kecenderungan utama hati manusia berdosa.<sup>4</sup> Dalam lingkup sosial yang lebih luas, pengalaman menyaksikan bahwa kecenderungan-kecenderungan semacam itu adalah ancaman bagi ketentraman sosial. Di sini, kita dapat memahami mengapa baginya kegagalan prinsip otoritas dalam keluarga akan memberikan dampak negatif kepada tatanan masyarakat yang lebih luas. Ia melihat adanya paralelisme perintah kelima dari hukum Taurat dengan perintah-perintah lainnya di dalam Alkitab agar orang Kristen menghormati pemimpin-pemimpin di masyarakat yang dipercaya untuk memegang otoritas-otoritas sosial tertentu.<sup>5</sup>

Jika kita bandingkan penekanan Calvin terhadap prinsip “otoritas” yang berasal dari keluarga dengan kecenderungan keluarga pada zaman modern ini, maka ada perbedaan yang sangat kontras. Kecenderungan zaman modern atau pascamodern adalah penolakan terhadap segala hal yang bersifat “otoritatif.” Generasi modern dan sekular bukan hanya tidak dapat mengerti prinsip otoritas, mereka bahkan tidak memiliki toleransi terhadap segala hal yang berbau otoritas. Jauh sebelum memasuki era pascamodern, Harry Blamires telah memprediksikan bahwa kecenderungan zaman ini adalah rasa muak terhadap otoritas.<sup>6</sup> Pada zaman sekarang ini, istilah “otoritas” mengandung konotasi negatif: “imperialisme,” dan karenanya patut di jauhi. Kebebasan individu dan kemandirian (*self-sufficiency*) adalah falsafah hidup di era modern.

Salah satu bentuk pengaruh individualisme dalam keluarga adalah dilucutnya prinsip “otoritas” dari konsep “orangtua.” Imbas modernisasi ini tidak membedakan apakah seseorang hidup di Barat atau di Timur. Modernisasi sekular mengajarkan kecenderungan untuk berpikir bahwa “tunduk pada otoritas” hanyalah salah satu “fase perkembangan pribadi” yang pada akhirnya seseorang harus tanggalkan; dewasa artinya mandiri, bebas, dan tidak diikat oleh otoritas apapun, termasuk otoritas orangtua. Di era individualisasi sekarang ini, makin sulit usaha menegakkan otoritas yang mengikat di dalam keluarga. Kesulitan ini muncul bukan hanya

<sup>4</sup>Lih. *ibid.* 12.

<sup>5</sup>Calvin menyebutkan ayat-ayat antara lain: Amsal 24:21; 1 Petrus 2:13; Roma 13:1; Efesus 6:5; 1 Petrus 2:14, 18.

<sup>6</sup>“*But for the most part we move in a world in which thinking and feeling alike are colored with a distaste for authority unparalleled in history*” (*The Christian Mind: How Should a Christian Think?* [Vancouver: Regent College, 2005] 133).

karena anak-anak yang tidak menghormati orangtua, tetapi juga barangkali karena kesalahan orangtua sendiri yang tidak menghargai otoritas yang Tuhan titipkan; atau oleh karena orangtua yang menyalahgunakan dan menyalahartikan konsep “otoritas” yang Tuhan berikan.

Di tengah-tengah fakta semacam ini, prinsip otoritas yang Calvin tekankan dalam ajarannya tentang keluarga patut kita uji kebenarannya di dalam konteks sosial. *Pertama*, ia mengajak kita untuk mengamati adanya kaitan antara problem-problem sosial dalam masyarakat dengan kegagalan ditegakkannya prinsip otoritas dalam keluarga. Mundurnya ketaatan moral dalam masyarakat, barangkali disebabkan oleh lunturnya otoritas orangtua. *Kedua*, belajar darinya dan dari kecenderungan individualisme di dalam budaya sekular, barangkali pertanyaan yang lebih penting yang patut kita ajukan bukanlah bagaimana kita dapat mempertahankan relasi keluarga yang harmonis di tengah-tengah proses individualisasi, tetapi bagaimana kita dapat mengembalikan orientasi ketuhanan sebagai pusat keluarga. Ia percaya bahwa otoritas orangtua datangnya dari Tuhan, dan ketaatan pada Tuhan adalah kunci keutuhan sistem hirarki yang harmonis dalam keluarga.<sup>7</sup> Kebebasan individu akibat modernisasi mengancam keutuhan keluarga bukan lantaran kebebasan individu pada dirinya sendiri selalu merupakan hal yang buruk, tetapi karena kebebasan individu dengan mudah membawa kita jauh dari sumber otoritas yang utama, yaitu Tuhan sendiri.

## 2. GEREJA

Di dalam arus deras modernisasi, sering terdengar pertanyaan semacam ini, “Apakah peran gereja di dalam dunia modern?” Pertanyaan yang kedengarannya netral ini bila ditanyakan dengan “mentalitas sekular” seringkali mengandung asumsi negatif tentang konsep gereja tradisional. Yang penulis maksud dengan “mentalitas sekular” adalah asumsi-asumsi yang dilandaskan pada kriteria sekular tentang kemajuan zaman, yang mana kemudian kriteria tersebut dipakai untuk mengukur kegagalan atau kesuksesan gereja dalam perannya di tengah-

<sup>7</sup>“Still, the power of a father is so limited as that God, on whom all relationships depend, should have the rule over fathers as well as children; for parents govern their children only under the supreme authority of God. Paul, therefore, does not simply exhort children to obey their parents, but adds the restriction, ‘in the Lord;’ whereby he indicates that, if a father enjoins anything unrighteous, obedience is freely be denied him” (Commentaries on the Four Last Books of Moses 8).

tengah masyarakat modern. Contohnya, tidak jarang dipakai efektifitas kemajuan teknologi yang banyak membantu mempermudah aspek-aspek hidup sehari-hari, seperti dalam hal komunikasi atau pengelolaan perusahaan, untuk menilai peran gereja dalam memajukan kesejahteraan sosial. Bila gereja dinilai tidak memberikan “dampak” apapun, atau hanya sedikit saja, atau bahkan menghambat kemajuan zaman, orang Kristen kemudian akan merasa bersalah, lalu berusaha mendefinisikan ulang gereja dan “menyesuaikan” gereja dengan zaman.

Gereja harus peka terhadap zaman adalah hal yang benar. Gereja harus peka terhadap konteks sosial di mana ia berada adalah hal yang sudah sepatutnya. Tetapi jikalau kepekaan itu menjauhkan kita dari hakikat dan panggilan gereja yang sebenarnya, mungkin kita sudah berjalan terlalu jauh. Kekeliruan “mentalitas sekular” adalah “memutarbalikkan” proses berpikir dalam hal relasi antara gereja dengan budaya. Ketika, misalnya, kita memakai efektifitas teknologi dalam memajukan kehidupan sosial untuk mengukur peran gereja, maka kita sedang memutarbalikkan panggilan dan misi gereja untuk menjadi garam dan terang dunia, di mana melalui panggilan dan misi tersebut gereja mestinya justru memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap teknologi. Prinsip yang sama berlaku untuk aspek-aspek kehidupan lainnya. Berangkat dari sudut pandang Calvin, penulis berpendapat bahwa “mentalitas sekular” terjadi sekali lagi oleh karena lunturnya makna “otoritas” akibat menjamurnya konsep kebebasan individu di dalam proses modernisasi dan sekularisasi.

Salah satu hal yang menarik ketika beralih dari pengajaran Calvin tentang keluarga kepada gereja adalah pergantian figur atau metafora otoritas yang digunakan olehnya. Di dalam menekankan konsep otoritas dalam keluarga, ia banyak memakai figur “ayah” (*fatherhood*), sedangkan dalam berbicara tentang gereja, ia memilih untuk memakai metafora “keibuan” (*motherhood*). Dalam tafsiran terhadap Surat Galatia, ia mengumpamakan gereja seperti pangkuan seorang ibu di mana bayi dan anak-anak diberi makan, dibesarkan, dan diayomi.<sup>8</sup> Di dalam *Institutes*,

<sup>8</sup>“Such are reasons why the Church is called the mother of believers . . . for it is only through the instrumentality of the Church that we are ‘born of God,’ (1 John iii. 9), and brought up through the various stages of childhood and youth, till we arrive at manhood” (*Commentaries on the Epistles of Paul to the Galatians and Ephesians* [trans. William Pringle; Grand Rapids: Eerdmans, 1948] 141).

ia mengingatkan setiap orang percaya bahwa keberadaan mereka adalah seperti anak-anak yang dilahirkan dan diasuh oleh seorang ibu.<sup>9</sup>

Di dalam konteks sosial, walaupun keluarga adalah institusi pertama dan hakiki yang menopang kesejahteraan masyarakat, bagi Calvin gereja memegang otoritas yang sifatnya lebih luas. *Pertama*, sebagai organisme orang percaya, pada dirinya sendiri gereja berotoritas karena gereja merupakan tubuh Kristus, atau dengan kata lain kelanjutan kehadiran Kristus sendiri di dalam dunia ini.<sup>10</sup> *Kedua*, gereja memiliki otoritas kenabian (*prophetic*) di tengah-tengah masyarakat. Keberadaan gereja sebagai organisasi kemanusiaan memang tidak akan pernah sempurna selama di dunia ini, tetapi ia percaya bahwa hal itu bukanlah alasan untuk mengabaikan panggilan utama gereja, yaitu memberitakan firman Tuhan yang murni dan menjadi terang bagi seluruh umat manusia.<sup>11</sup> *Ketiga*, gereja mengemban otoritas rohani, yaitu bahwa gereja adalah satu-satunya institusi yang ditetapkan oleh Kristus sendiri untuk menjalankan amanat-amanat rohani, antara lain: mengadakan perjamuan kudus, membaptis, memberitakan injil, serta memuridkan.<sup>12</sup> Sakramen khususnya, bersama dengan pemberitaan firman yang murni, baginya merupakan dua ciri utama gereja.

Hal yang sering kali dilupakan dari teologi sakramen yang Calvin ajarkan adalah dampak sosial sakramen. Baginya, pelaksanaan sakramen bukanlah sekedar embel-embel liturgi kebaktian; sakramen adalah persekutuan umat Tuhan dengan Kristus sendiri di mana setiap orang percaya dipanggil untuk menjadi komunitas yang kudus di tengah-tengah dunia yang berdosa. Dengan kata lain, dari sudut pandang etika sosial, mengambil bagian dalam sakramen merupakan komitmen moral di mana melalui persekutuan dengan tubuh Kristus kita bertekad untuk memancarkan penebusan kasih Kristus di tengah-tengah masyarakat. Tentang perjamuan kudus, ia berkata,

<sup>9</sup>“For there is no other way to enter into life unless this mother conceive us in her womb, give us birth, nourish us at her breast, and lastly, unless she keep us under her care and guidance until, putting off mortal flesh, we become like angels” (*Institutes of the Christian Religion* IV.1.4. [ed. John T. McNeill; trans. F. L. Battles; Philadelphia: Westminster, 1960] 1016).

<sup>10</sup>“... the Church is His fullness (*completum*), as if He would be mutilated in some way, were He to be separated from His members” (*The First Epistle of Paul the Apostle to the Corinthians* [trans. John W. Fraser; Grand Rapids: Eerdmans, 1960] 264).

<sup>11</sup>*Institutes* IV.1.10 1024-1025.

<sup>12</sup>*Institutes* IV.1.1, IV.1.5 1011-1012, 1016-1020.

. . . alangkah baiknya kalau semua orang Kristen mendapat perjamuan sesering mungkin, sehingga setiap saat mereka diingatkan tentang penderitaan Kristus. Dengan demikian iman mereka akan terus-menerus ditopang dan diteguhkan, sehingga mereka akan setiap saat terdorong untuk memuliakan Allah dan memancarkan kebaikan-Nya; menyimpan dalam hati kasih karunia-Nya dan saling berbagi kasih satu dengan lainnya, yaitu kasih yang mengikat yang mereka saksikan melalui kesatuan tubuh Kristus.<sup>13</sup>

Dengan demikian, yang *keempat*, gereja juga memegang otoritas moral, yaitu menyaksikan gaya hidup dan pertimbangan-pertimbangan moral yang dilandaskan pada terang firman Tuhan. Otoritas ini mencakup teladan dalam menjalankan disiplin rohani dan etika.<sup>14</sup>

Walaupun cakupan otoritas gereja cukup luas, Calvin tetap membedakan antara otoritas gerejawi (*ecclesial ordinance*) dari otoritas sipil (*civil ordinance*). Hal ini bukan berarti bahwa ia memisahkan gereja dari pemerintahan sipil. Baginya, gereja dan negara bukanlah dua institusi yang dilandaskan pada dua prinsip sosial yang sama sekali berbeda, tetapi dua elemen dari satu organisme yang sama, yaitu organisme kehadiran pemeliharaan Tuhan di dalam dunia. Dengan kata lain, kedua lembaga ini sama-sama bertanggung jawab kepada Tuhan dan patut dipimpin oleh terang firman Tuhan yang sama, tetapi masing-masing memiliki tugas dan fungsi yang berbeda. Gereja memegang otoritas rohani, sedangkan pemerintah memegang otoritas sipil. Penulis akan menjelaskan prinsip ini lebih lanjut di bagian ketiga tulisan ini, yaitu konsep Calvin tentang pemerintah atau negara. Cukup bagi kita sekarang ini untuk memahami bahwa baginya gereja sebagai institusi sosial, memiliki jangkauan otoritas yang lebih luas daripada institusi keluarga, tetapi wilayah otonomi yang berbeda dari otonomi pemerintah.

<sup>13</sup> . . . but that all Christians might have it in frequent use, and frequently call to mind the sufferings of Christ, thereby sustaining and confirming their faith: stirring themselves up to sing the praises of God, and proclaim his goodness; cherishing and testifying towards each other that mutual charity, the bond of which they see in the unity of the body of Christ" (*Institutes* IV.17.44 1422).

<sup>14</sup> "It is of no small importance that it [the Church] is called 'the pillar and ground of the truth' and 'the house of God'" (*Institutes* IV.1.10 1024); "Christ wishes His disciples to be more keenly concerned to live in a godly and holy way, than the nondescript members of the crowd, for the eyes of all are turned on them as upon a beacon" (*A Harmony of the Gospels: Matthew, Mark & Luke* [trans. A. W. Morrison; Grand Rapids: Eerdmans, 1972] 1.177).

Berangkat dari pemahaman Calvin tentang otoritas gereja, dapat dilihat bahwa jikalau “mentalitas sekular” cenderung mengabaikan otoritas gereja dan membuat kita sibuk mengadaptasikan dan membuat gereja makin serupa dengan dunia modern, maka yang Calvin tekankan adalah kebalikannya, yaitu bagaimana mestinya gereja sibuk membuat budaya modern makin sejalan dengan terang firman Tuhan. Jikalau kita, seperti Calvin, percaya bahwa iman Kristen itu benar dan memiliki otoritas ilahi, maka kita juga akan melihat gereja sebagai institusi yang berotoritas yang dipakai oleh Tuhan untuk “menyelamatkan” dunia. Kita tidak akan pernah menganggap aspek-aspek rutin dalam gereja sekedar sebagai aktivitas-aktivitas yang membosankan dan melelahkan, tetapi sebagai latihan rohani untuk kita hidup sebagai pembawa-pembawa terang di tengah-tengah masyarakat.

### 3. PEMERINTAH

Berbicara tentang pemerintah atau negara, maka kita kembali diperhadapkan pada isu tentang otoritas. Tetapi isu yang terjadi di dalam hal ini berbeda dengan apa yang terjadi dalam dua institusi yang telah kita bicarakan. Hampir di setiap zaman, khususnya di abad kedua puluh kita menyaksikan banyaknya penyalahgunaan wewenang atau otoritas pemerintahan sipil. R. J. Rummel dalam bukunya *Death by Government* menyingkapkan bahwa di abad kedua puluh ini saja jumlah korban politik akibat penyalahgunaan otoritas pemerintah sungguh sangat mengejutkan. Angka-angka berikut ini, penulis ambil dari halaman daftar isi buku *Death by Government*:<sup>15</sup>

<b>Jumlah Korban</b>	<b>Korban Politik dari</b>
61.911.000	Kamp konsentrasi pemerintah Rusia
35.236.000	Pemerintah komunis di Cina
20.946.000	Partai Nazi di Jerman
10.214.000	Partai Kuomintang di Taiwan
5.964.000	Pemerintahan militer di Jepang
2.035.000	Khmer Merah di Kamboja

Satu hal yang sangat jelas yang dikomunikasikan lewat data di atas adalah fakta penyelewengan otoritas politik. Satu korban jiwa saja akibat

<sup>15</sup>(New Brunswick: Transaction, 2004) v-vi.

rancangan politik mestinya sudah merupakan cukup bukti untuk menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan; angka-angka di atas merupakan bukti penyelewengan kekuasaan politik yang jauh melampaui hati nurani setiap manusia normal. Fakta ini juga menunjukkan betapa mudahnya mereka yang memegang otoritas politik untuk memakai kekuasaannya dengan sewenang-wenang.

Diperhadapkan kepada fakta penyalahgunaan kekuasaan, mungkin sulit diterima pendapat bahwa bagi Calvin pemerintah sipil adalah “ketetapan yang mulia dari Tuhan” yang patut kita syukuri.<sup>16</sup> Ia percaya bahwa setiap *hak* pemerintahan sipil datangnya dari Tuhan sendiri demi untuk kesejahteraan umat manusia dan bukan sebagai sumber malapetaka sosial.<sup>17</sup> Keyakinan yang ia pegang ini memiliki dasar Alkitab dalam kata-kata rasul Paulus bahwa, “Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah, yang tidak berasal dari Allah; dan pemerintah-pemerintah yang ada, ditetapkan oleh Allah” (Rm. 13:1-2). Bila kita cermati ayat tersebut, nasehat rasul Paulus agar setiap orang percaya mematuhi pemerintah adalah sebuah nasehat tanpa perkecualian. Ayat ini bisa dimengerti bahwa bahkan terhadap pemerintah yang tidak Kristen dan anti Kekristenan, orang-orang percaya harus menghormati dan mentaati hak-hak politik yang pemerintah pegang.

Calvin memahami nasihat rasul Paulus dalam Roma 13:1-2 sebagai nasihat yang ditujukan khususnya kepada sekelompok orang Kristen di Roma yang beranggapan bahwa sebagai umat Tuhan mereka tidak lagi hidup di bawah otoritas sipil apapun, sehingga mereka bebas untuk mentaati atau tidak mentaati, membayar pajak atau tidak membayar pajak kepada pemerintah. Tulisan rasul Paulus merupakan koreksi terhadap asumsi yang salah semacam itu. Sama seperti rasul Paulus, ia mengajak kita untuk melihat sisi positif dari kekuasaan politik, yaitu sebagai institusi sosial yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri untuk menjaga kedamaian sebuah negara.<sup>18</sup> Seperti di bagian-bagian lainnya, ia selalu melihat pemberian dari Tuhan sebagai sesuatu yang baik, termasuk pemerintahan sipil. Itu sebabnya, sama seperti ketika Calvin membahas tentang konsep

<sup>16</sup>“*Let us, then, continue to honour the good ordinance of God*” (*The Epistles of Paul the Apostle to the Romans and to the Thessalonians* [trans. Ross MacKenzie; Grand Rapids: Eerdmans, 1961] 282).

<sup>17</sup>Calvin membedakan antara “bentuk” pemerintahan sipil yang tidak selalu sejalan dengan kehendak Tuhan dengan “hak” pemerintahan sipil yang adalah pemberian Tuhan (ibid. 281).

<sup>18</sup>“*There are always some restless spirits who believe that the kingdom of Christ is properly exalted only when all earthly powers are abolished . . .*” (ibid. 280).

otoritas dalam keluarga, ia juga berkata bahwa jika seseorang tidak menghormati pemerintah, hal itu juga sama saja dengan tidak menghormati pemeliharaan tangan Tuhan yang telah menegakkan setiap otoritas negara. Dengan kata lain, ia percaya bahwa penguasa politik yang resmi harus kita hormati bukan karena kita takut kepada pemerintah, tetapi karena kita menghormati ketetapan Tuhan.<sup>19</sup>

Di lain pihak, berdasarkan pemahamannya tentang pemeliharaan dan kuasa Tuhan, Calvin percaya bahwa kekuasaan pemerintah adalah kekuasaan yang sifatnya terbatas. Pejabat politik adalah “hamba” atau “pelayan” dan bukan “tuan.”<sup>20</sup> Kekuasaan mereka dibatasi oleh kewajiban untuk menyejahterakan warga negara. Mereka adalah penatalayan Tuhan di bumi, yang mana berarti mereka harus mempertanggungjawabkan setiap perbuatan mereka kepada Tuhan sendiri. Di sini ia juga melihat persinggungan antara otonomi gereja dengan negara. Walaupun masing-masing institusi memiliki otonomi yang berbeda, tetapi karena keduanya datangnya dari Tuhan, ia percaya bahwa gereja memiliki hak dan kewajiban untuk mengingatkan penguasa politik tentang kebenaran firman Tuhan. Hal itu tidak berarti bahwa baginya otoritas gereja sifatnya lebih tinggi daripada pemerintah. Baginya, kedua otonomi tersebut sifatnya berbeda tetapi sejajar. Gereja tidak memiliki supremasi politik di atas pemerintahan sipil, dan pemerintah juga tidak berhak untuk mencampuri fungsi rohani gereja.<sup>21</sup> Pada waktu gereja menjalankan otoritas kenabiannya dengan, misalnya, mengingatkan pemerintah tentang kebenaran firman Tuhan dalam isu aborsi, ia akan berkata bahwa hal itu patut kita lakukan bukan dengan asumsi bahwa gereja sifatnya lebih tinggi daripada pemerintah, tetapi berangkat dari kesadaran bahwa pemerintah juga harus tunduk pada otoritas firman Tuhan.

Di samping tanggung jawab langsung kepada Tuhan, Calvin juga memakai konsep “dosa asal” sebagai landasan untuk menegaskan pentingnya membatasi otoritas sipil. Sebagai manusia berdosa kita semua pada dasarnya cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan (*corruptible*). Dengan “otoritas” dan kekuasaan di tangan, potensi seseorang untuk berbuat jahat menjadi lebih besar karena asumsi bahwa ia berada di atas hukum moral. Itu sebabnya ia mengingatkan bahwa

<sup>19</sup>“ . . . we ought to obey kings and all other governors, not because we are compelled, but because this is an obedience acceptable to God” (ibid. 284).

<sup>20</sup>Ibid. 282.

<sup>21</sup>Lih. *Institutes* IV.11.3-5, IV.20.2 1215-1217, 1487-1488.

walaupun panggilan politik adalah salah satu panggilan yang mulia karena berkaitan dengan kesejahteraan rakyat, panggilan ini memiliki tanggung jawab rohani dan moral yang tidak kecil. Hanya mereka yang sadar tentang kedaulatan Tuhan dan keberdosaan manusia tahu menempatkan otoritas pemerintah sipil pada tempatnya.<sup>22</sup>

#### 4. EKONOMI

Jikalau problem dalam institusi pemerintah adalah penyalahgunaan otoritas, maka tantangan utama dalam institusi ekonomi adalah penghambaan pada otoritas yang salah, yaitu Mammon. Barangkali karya tulis klasik yang hingga sekarang ini tetap menjadi pegangan utama dalam menjelaskan kaitan antara Calvin atau Calvinisme dengan ekonomi adalah tulisan Max Weber, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, yang pertama kali dipublikasikan pada 1904. Pada intinya, Weber berpendapat bahwa iman agama—dalam hal ini Calvinisme—adalah sumber utama etos ekonomi—atau dalam hal ini kapitalisme. Teori ini adalah kebalikan dari Marxisme yang berpendapat bahwa ekonomi adalah spirit utama dalam seseorang beragama atau berteori. Sejak Weber memopulerkan pandangannya, ia banyak mengundang kritik dan dukungan. Mereka yang menentang teori Weber memiliki alasan dan motivasi yang berbeda-beda. Ada yang menentang karena lebih setuju dengan pendekatan sosialisme ketimbang kapitalisme; ada pula yang menolak karena tidak suka dengan Calvinisme; kelompok yang lain lagi menentang dengan alasan bahwa teori Weber tidak valid karena “Calvinisme” yang Weber maksud bukan Calvinisme-nya Calvin tetapi Puritanisme dari abad kedelapan belas dan kapitalisme modern di Eropa dan Amerika. Demikian pula mereka yang mendukung teori Weber berangkat dari alasan dan motivasi yang beraneka-ragam.<sup>23</sup>

Apakah teori Weber benar atau salah, hal itu ada di luar jangkauan tulisan ini. Satu hal yang pasti ialah bahwa sejak revolusi industri dan modernisasi teknologi merambah Eropa dan kemudian hampir seluruh belahan bumi, kita menyaksikan bahwa aspek *religious* tidak lagi memiliki tempat dalam perkembangan ekonomi. Tidak peduli kita berbicara

<sup>22</sup>Lih. *Institutes* IV.20.6 1491-1492.

<sup>23</sup>Survei umum tentang tulisan-tulisan dari para pendukung dan penentang teori Weber dapat dilihat dalam W. Stanford Reid, “Jean Calvin: the Father of Capitalism?” dalam *Calvin’s Thought on Economics and Social Issues and the Relationship of Church and State* (ed. Richard Gamble; New York: Garland, 1992) 199-205.

ekonomi dari sudut apapun, kita cenderung berpikir bahwa bisnis adalah bisnis dan agama adalah agama; bisnis adalah uang dan uang adalah bisnis! Ada semacam tirai besi yang memisahkan cara kita berpikir tentang iman Kristen dari cara kita berpikir tentang ekonomi.

Bila Calvin hidup di zaman sekarang, ia akan melihat kondisi semacam itu sebagai malapetaka. Pemikir sekular seperti Aristoteles pun tahu bahwa ketika uang menjadi segala-galanya, maka kita jatuh pada pola hidup yang “tidak berbudi” (*unvirtuous*). Uang adalah hanya alat tukar-menukar di dalam sistem ekonomi. Ada banyak aspek kehidupan lainnya yang jauh lebih penting, seperti kualitas moral, yang harus kita kejar dan kita tempatkan di atas harta benda.<sup>24</sup> Ia akan menyetujui pendapat Aristoteles, tetapi dengan alasan yang lebih alkitabiah. Ia percaya bahwa institusi atau sistem perekonomian merupakan wujud lain dari pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan umat manusia. Kita dicipta, di antaranya, sebagai makhluk ekonomi dengan kapasitas untuk bekerja dan tahu bagaimana memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, serta mencari kesejahteraan hidup. Tetapi sebagai manusia yang sudah berdosa, kita dapat dengan mudah jatuh ke dalam berbagai penyalahgunaan kapasitas kerja yang Tuhan sudah berikan, pada waktu “hati” atau “mata rohani” kita tidak kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam tafsiran terhadap Matius 6:19-24, ia menunjukkan kepada kita pentingnya “hati” (mata rohani) dalam memimpin aktivitas keseharian kita sebagai makhluk ekonomi.<sup>25</sup>

Yang Calvin maksud dengan aktivitas ekonomi yang dipimpin oleh “hati” atau “mata rohani” adalah: uang memiliki kapasitas untuk memberikan hal-hal yang mirip dengan janji-janji yang kita peroleh dari iman kita kepada Tuhan, antara lain: kebahagiaan dan keamanan. Kita jatuh dalam dosa pada waktu kita merasa puas dan lupa bahwa jenis kebahagiaan dan keamanan yang datangnya dari uang, dibandingkan dengan kebahagiaan dan keamanan yang Tuhan janjikan, sifatnya hanya sementara saja di bumi ini. Bagaimana seandainya kita berkata bahwa kita memegang “janji” kedua-duanya? Berdasarkan kata-kata Tuhan Yesus dalam Matius 6:19-24, ia menegaskan bahwa hal itu mustahil terjadi! Kita tidak dapat mengabdikan kepada dua tuan. Kedagingan akan menyeret kita pada pengabdian kepada Mammon. Dan kita juga keliru jika kita

<sup>24</sup>Lihat pembahasan Aristoteles tentang karakter “murah hati” (*generosity*) dalam bukunya *Nicomachean Ethics* (2nd. ed.; trans. Terence Irwin; Indianapolis: Hackett, 1999) 49-53.

<sup>25</sup>Lihat *A Harmony of the Gospels* 1.217-219.

berpikir bahwa Tuhan akan puas menerima hati kita yang bercabang. Di sini ia tidak bermaksud untuk berkata bahwa uang adalah sesuatu yang jahat pada dirinya. Ia juga tidak berkata bahwa orang yang hartanya banyak tidak dapat melayani Tuhan. Yang ia mau tekankan adalah hati yang sepenuhnya terpaut pada janji Tuhan di atas segala-galanya. Waktu mata hati kita terpaut pada Tuhan, kita hidup tanpa diikat oleh harta benda duniawi. Kita bekerja, memakai, dan memberi dengan sukacita karena kita tahu semuanya datangnya dari Tuhan. Tetapi waktu hati kita terpaut pada Mammon, mata hati kita menjadi gelap, kita diikat oleh harta benda duniawi dan dengan mudah jatuh dalam berbagai dosa: serakah, tidak jujur, iri hati, dan sebagainya.<sup>26</sup>

Calvin percaya bahwa manusia dicipta untuk bekerja. Bahkan sebelum manusia jatuh dalam dosa, Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di taman Eden dengan maksud agar mereka bekerja. Setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia harus bekerja lebih keras karena tanah di mana mereka bekerja sudah “terkutuk.”<sup>27</sup> Dengan demikian bekerja adalah tujuan (*purpose*) mengapa kita ada di dunia ini dan panggilan (*calling*) yang harus kita penuhi. Naum, ia tidak pernah mendorong orang untuk bekerja secara berlebihan. Dari kisah seperti Maria dan Marta, ia mendukung prinsip bekerja secukupnya (*moderate work*).<sup>28</sup> Ia juga memegang konsep kepemilikan secukupnya (*moderate property*). Ia percaya bahwa “proporsi” dan “kesamarataan” adalah prinsip ekonomi yang sehat. Kelebihan yang Tuhan berikan merupakan kesempatan untuk kita berbuat baik kepada mereka yang berkekurangan.<sup>29</sup> Ia melihat harta benda sebagai ujian bagi rasa kemanusiaan seseorang kepada sesamanya dan ujian bagi kerendahan hati seseorang.

Calvin tidak menulis tentang sistem ekonomi, tetapi ia banyak berbicara tentang etika ekonomi. Pelajaran yang kita bisa ambil dari tulisannya adalah bahwa sistem ekonomi yang sehat membutuhkan pelaku-pelaku ekonomi yang memahami aktivitas yang mereka lakukan sebagai tanggung jawab kepada Tuhan sendiri. Dari segi iman Kristen kita dapat berkata bahwa sebuah sistem ekonomi bukan sumber keadilan sosial.

<sup>26</sup>Lihat *ibid.*

<sup>27</sup>*Commentaries on the First Book of Moses Called Genesis* (trans. John King; Grand Rapids: Baker, 1999) 1.97-100, 173.

<sup>28</sup>*A Harmony of the Gospels* 2.141.

<sup>29</sup>“God wills that there be proportion and equality among us, that is, each one is to provide for the needy according to the extent of one’s means, so that no one has too much and no one has too little” (dikutip dalam Andre Bieler, *The Social Humanism of Calvin* [trans. Paul T. Fuhrmann; Richmond: John Knox, 1964] 37).

Kapitalisme atau sosialisme tidak dengan sendirinya menciptakan keadilan sosial. Di tangan orang-orang yang hatinya terpaut pada harta duniawi, kapitalisme maupun sosialisme yang sehat dapat mendatangkan ketidakadilan.

## 5. PENDIDIKAN

Dari kelima pilar sosial yang dibicarakan dalam tulisan ini, pendidikan menempati urutan pertama dari segi tenaga dan perhatian yang Calvin curahkan. Lebih dari semua tokoh Reformasi pada zamannya, ia memiliki perhatian khusus terhadap aspek pendidikan. Walaupun fokus utamanya adalah pendidikan gerejawi, yaitu pengajaran Alkitab dan teologi bagi pelayan-pelayan Tuhan dan jemaat, pada akhirnya semangat tersebut melahirkan sistem pendidikan di semua level, di luar ruang lingkup gereja, mulai dari pendidikan untuk anak-anak hingga jenjang universitas dan tingkat lanjut.<sup>30</sup>

Calvin percaya bahwa pendidikan memiliki sifat yang tidak terbatas karena berakar di dalam hikmat Tuhan sendiri yang sifatnya tak terbatas. Sebagai perwujudan dari hikmat Tuhan sendiri, ia tidak pernah melihat pendidikan semata-mata hanya sebagai aktivitas intelek. Pengetahuan yang dihasilkan lewat pendidikan sifatnya ilahi, itu sebabnya baginya pendidikan lebih menyerupai proses pendewasaan iman. Teologi adalah bagian integral dari setiap aspek pendidikan. “Inti hikmat ilahi,” ia berkata, “adalah sebagai berikut: dengan hati yang berpusat pada Tuhan melalui iman yang sejati, orang-orang berseru kepada-Nya, dan mereka melatih diri mereka melalui perenungan atas kebaikan-kebaikan-Nya dengan maksud untuk menopang iman mereka kepada-Nya.”<sup>31</sup>

<sup>30</sup>Lihat antara lain Barbara Pitkin, “‘The Heritage of the Lord’: Children in the Theology of John Calvin” dalam *The Child in Christian Thought* (Grand Rapids: Eerdmans, 2001) 160-193; Ivan L. Zabilka, “Calvin’s Contribution to Universal Education,” *The Asbury Theological Journal* 44/1 (1989) 77-96.

<sup>31</sup>“... the sum of heavenly wisdom consists in this, that men, having their hearts fixed on God by a true and unfeigned faith, call upon him, and that, for the purpose of maintaining and cherishing their confidence in him, they exercise themselves in meditating in good earnest upon his benefits; and that then they yield to him an unfeigned and devoted obedience” (*Commentary on the Book of Psalm* [trans. James Anderson; Grand Rapids: Baker, 1996] 3.233). Konteks dari Mazmur 78 ini adalah nasihat kepada para orangtua dalam mendidik anak-anak mereka.

Falsafah pendidikan semacam ini barangkali kedengaran asing di telinga orang-orang modern dan di dunia sekular. Di era di mana teori evolusi sekular dan positivisme sudah diterima sebagai metode ilmiah yang sah di semua segi ilmu pengetahuan, sulit bagi orang-orang modern untuk memahami bahwa proses belajar adalah proses merenungkan “kebaikan-kebaikan Tuhan.” Di era di mana fenomena jaringan internet sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari sehingga informasi apapun yang kita butuhkan dapat diperoleh dengan mudah, sulit untuk membayangkan bahwa proses belajar adalah proses untuk mendewasakan iman. Apakah hal ini berarti bahwa jika ia hidup di zaman sekarang ia akan menolak modernisasi dan sarana-saran teknologi yang mempermudah proses belajar? Penulis percaya bahwa ia tidak akan menolak modernisasi pendidikan. Falsafah pendidikannya barangkali “pra-modern,” tetapi hal itu tidak sama dengan “anti-modern.” Ada banyak hal positif dari modernisasi yang bisa dipakai untuk membantu memajukan pendidikan Kristen sejauh hakekat iman dalam pendidikan tetap merupakan titik berangkat filsafat pendidikan.

Barangkali, bagi Calvin hal yang lebih merupakan tantangan bagi pendidikan di zaman sekarang adalah pragmatisasi atau mekanisasi pendidikan. “Mekanisasi pendidikan” adalah sebuah filsafat pendidikan—yang disadari atau tidak—yang melihat manusia lebih sebagai “fungsi” daripada “pribadi.” Sama seperti sebuah mesin elektronik yang terdiri dari komponen-komponen yang terkait satu dengan lainnya berdasarkan “fungsi” masing-masing komponen, falsafah pendidikan sekular adalah lebih soal bagaimana seseorang dapat “berfungsi” di dalam masyarakat. Falsafah semacam ini menjadikan profesi sebagai kriteria bagi jatidiri dan nilai hidup seseorang. Falsafah semacam ini juga cenderung menganggap “pendidikan” yang tidak menghasilkan atau tidak berkaitan langsung dengan profesi di masyarakat memiliki “nilai” yang lebih rendah ketimbang pendidikan yang menghasilkan profesi.

Bagi Calvin, hal utama dan pertama dalam pendidikan adalah konsep tentang “manusia seutuhnya.” Ada beberapa tahap untuk memahami pemikirannya tentang “manusia seutuhnya.” *Pertama*, ia melihat manusia sebagai makhluk yang dicipta untuk belajar (*a learning creature*), yaitu mempelajari segala struktur ciptaan yang Tuhan telah tempatkan dalam dunia ciptaan-Nya.<sup>32</sup> *Kedua*, ia memahami manusia seutuhnya dalam arti sebagai makhluk yang dicipta dalam gambar Allah dan yang sudah jatuh dalam dosa. Dua hal ini—manusia sebagai gambar Allah dan dosa—

<sup>32</sup>Lih. *Institutes* I.5.1, II.2.12 51-53, 270-71.

memegang peran penting dalam falsafah pendidikannya. Keduanya menjadi alasan positif dan negatif mengapa pendidikan adalah institusi yang penting. Gambar Allah memberi kita tujuan, sedangkan fakta kejatuhan adalah realitas yang harus diatasi lewat proses pendidikan. Pendidikan adalah proses pembentukan moral dan karakter. Tetapi pendidikan tidak memiliki pengharapan jika tidak ada anugerah penebusan Kristus. Itu sebabnya langkah *ketiga* untuk memahami konsepnya tentang manusia seutuhnya adalah bahwa baginya manusia belum sepenuhnya menjadi manusia bila ia tidak memiliki kaitan apapun dengan konsep anugerah atau supra-alamiah.<sup>33</sup> Belajar adalah “merenungkan” hikmat dan kebaikan Allah di dalam berbagai aspek dunia ciptaan-Nya, dan klimaks kebaikan Allah adalah anugerah penebusan Kristus. Proses belajar adalah proses “memanusiakan” ketika akal budi, hati, dan kehendak kita diubah dan ketika kita dibawa untuk semakin mengenal dan tunduk pada Tuhan. Hal ini tidak berarti bahwa teologinya tentang pendidikan bertentangan dengan pemikiran pragmatis modern tentang dunia pendidikan sebagai pemasok tenaga kerja dalam ekonomi. Hal ini lebih menunjukkan bahwa ia tidak membuat pemisahan antara teologi, pendidikan, dan profesionalisme tenaga kerja. Singkat kata, dari sudut pandang pemikirannya, jikalau melalui institusi pendidikan seseorang tidak dibawa semakin dekat dengan Tuhan, maka, *pertama*, institusi tersebut belum sungguh-sungguh menjalankan fungsinya, atau *kedua*, seseorang belum sungguh-sungguh menghayati apa yang ia pelajari.

## KESIMPULAN

Melalui tulisan ini, penulis telah mencoba memaparkan aplikasi pemikiran Calvin yang sangat menekankan kedaulatan Tuhan di dalam lima institusi sosial yang merupakan pilar-pilar kehidupan masyarakat. Baginya, kelima institusi sosial ini bukanlah sesuatu yang terbentuk di masyarakat secara kebetulan. Kelimanya berakar di dalam hikmat Tuhan sendiri dan merupakan wujud kebaikan Tuhan bagi umat manusia. Untuk menegaskan keunikan pandangannya tersebut, penulis telah mengkontraskan teologi sosial yang ia pegang dengan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat sebagai akibat modernisasi dan sekularisasi. Salah satu perbedaan yang sangat menonjol adalah di dalam konsep otoritas. Berangkat dari teologi Calvin, kita melihat peran utama

<sup>33</sup>Lih. *Institutes* I.2.1 39-41.

konsep otoritas—khususnya otoritas ilahi—di setiap institusi, yang mana di era sekarang ini tidak lagi dianggap penting. Penyelewengan otoritas dalam pemerintahan sipil barangkali tidak bersangkut paut langsung dengan modernisasi dan sekularisasi, tetapi dalam empat institusi lainnya (keluarga, gereja, ekonomi dan pendidikan) kita menyaksikan lunturnya makna otoritas sebagai imbas langsung dari sekularisasi. Apakah hal ini berarti bahwa jika ia hidup pada zaman sekarang, ia akan mempraktikkan “tradisionalisme” atau “*status quo*”? Sebaliknya, penulis melihat bahwa berangkat dari kesadaran tentang kedaulatan Tuhan dan realitas dosa, ia tidak akan pernah merasa puas dengan hal-hal yang telah dicapai dalam kelima pilar sosial tersebut, dan akan terus mengharapkan pembaharuan hari demi hari di semua bidang tersebut.